



KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

8. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024.

KESATU : Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 dan Rencana Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KETIGA : Pelaksanaan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 wajib diselaraskan dengan Tema dan pemenuhan Tujuh Agenda Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

- KEEMPAT : Para Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan bertanggung jawab atas pelaksanaan Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- KELIMA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

Bidang: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP 1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	IKU 1.1 Persentase SDM Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah Memiliki Sertifikat sesuai Standar Kompetensi	Faktor Pembilang: Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memperoleh sertifikat sesuai standar kompetensi Faktor Penyebut: Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia X 100	85%	85%	SS 1.1 Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian	Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tujuh Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024: 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah untuk	1. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat <i>Case Management System</i> (CMS) Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I (Pusdaskrimti). 2. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data <i>Security Operation Center</i> (SOC) Tahun Anggaran 2024	1. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (Biro Hukum dan HLN, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum). 2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Biro Umum). 3. Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
		IKU 1.2 Persentase Pejabat Struktural sesuai Kompetensi	Faktor Pembilang: Jumlah pejabat struktural yang mengikuti asesmen kompetensi Faktor Penyebut: Jumlah pejabat struktural yang	95%	95%	SS 1.1 Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wajib mengikuti asesmen kompetensi X 100			dan/atau Keahlian	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	(Biro Perlengkapan).	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Biro Umum).
		IKU 1.3 Persentase Satuan Kerja yang Telah Memenuhi Jumlah SDM sesuai Kebutuhan	Faktor Pembilang: Satuan kerja dengan jumlah SDM yang sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Faktor Penyebut: Jumlah satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia X100	90%	90%	SS 1.1 Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.		4. Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Biro Umum).
		IKU 1.4 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia	Indeks Profesionalitas ASN Kejaksaan Republik Indonesia	85	75	SS 1.1 Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum,		5. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Biro Hukum dan HLN, Biro Perencanaan). 6. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Termasuk Pendanaan Terorisme dan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKU 1.5 Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022)	Indeks NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara	90	85	SS 1.1 Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian	Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik.		Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Stranas TPPU, TPPT dan PPSPM) Tahun 2024 (Biro Hukum dan HLN).
2.	SP 2 Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia	IKU 2.1 Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Faktor Pembilang: Jumlah satuan kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% Faktor Penyebut: Jumlah satuan kerja yang melakukan pengelolaan keuangan yang telah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) X 100	95%	85%	SS 2.2 Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia			7. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (Biro Umum).

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKU 2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95	94.5	SS 2.2 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia			
3.	SP 3 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	IKU 3.1 Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Faktor Pembilang: Jumlah satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM	70	112	SS 2.2 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia			
4.	SP 4 Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	IKU 4.1 Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan <i>Master Plan</i> TI Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Faktor Pembilang: Jumlah terlaksananya kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan <i>Masterplan</i> TI Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	95%	95%	SS 6.1 Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis TI			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Faktor Penyebut: Jumlah kegiatan dalam <i>Masterplan</i> TI Kejaksaan Tahun 2020-2024 X 100						
		IKU 4.2 Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.0	3.5	SS 6.1 Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis TI			
5.	SP 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri	IKU 5.1 Persentasi Penerbitan Regulasi dan Pelayanan Hukum yang Tepat Waktu	Faktor Pembilang: Jumlah regulasi yang berhasil diterbitkan Faktor Penyebut: Jumlah regulasi yang direncanakan untk diterbitkan X 100	90%	90%	SS 2.1 Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kejaksaan Republik Indonesia			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKU 5.2 Persentase Keberhasilan Terjalannya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga	1. Faktor Pembilang: Jumlah kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang ditindaklanjuti Faktor Penyebut: Jumlah kerja sama dalam negeri dan luar negeri X 100 2. Faktor Pembilang: Jumlah permintaan bantuan terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kegiatan kekonsuleran yang ditindaklanjuti	95%	95%	SS 2.1 Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Faktor Penyebut: Jumlah seluruh permintaan bantuan perlindungan WNI dan kekonsuleran yang ditindaklanjuti X 100 3. Faktor Pembilang: Jumlah permintaan satuan kerja terkait ekstradisi yang ditindaklanjuti Faktor Penyebut: Jumlah seluruh permintaan satuan kerja terkait ekstradisi yang diterima X 100						

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	SP 6 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	IKU 6.1 Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	Faktor Pembilang: Jumlah satuan kerja dengan sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional Faktor Penyebut: Jumlah satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia X 100	90%	90%	SS 6.1 Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis TI			
7.	SP 7 Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Tata Kelola Aset	IKU 7.1 Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset	3.50	3.40	SS 2.1 Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia			
8.	SP 8 Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	IKU 8.1 Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa (PBJ)	Indeks PBJ	60	80	SS 2.1 Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia			
9.	SP 9 Meningkatnya Hasil Analisis Kebijakan	IKU 9.1 Persentase Hasil Analisis Kebijakan	Faktor Pembilang: Jumlah hasil analisis kebijakan penegakan hukum yang berhasil	90%	100%	SS 2.1 Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target Tahun 2024		Kontribusi terhadap Sasaran Strategis	RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024	Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2024	Tanggung Jawab Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional
				Rencana Strategis	Proyeksi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penegakan Hukum	Penegakan Hukum	dilaksanakan Faktor Penyebab: Jumlah hasil analisis kebijakan penegakan hukum yang dihasilkan X 100			Republik Indonesia			

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN